

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik etis¹ yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901 telah membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia, salah satunya adalah dengan munculnya golongan terpelajar yang kemudian menjadi pendorong kebangkitan nasional Indonesia. Pemberlakuan politik etis² di Hindia Belanda melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah, sekolah keguruan dan sekolah tinggi.

Kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda di Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari para bangsawan pribumi (elit pribumi), namun kemudian para bangsawan tersebut muncul sebagai kaum intelektual yang memikirkan nasib bangsanya.³

Proses tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan politik etis yang diusulkan oleh Van Deventer yang berisi gagasan agar pemerintah Belanda segera menjalankan program balas jasa. Kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan memunculkan gagasan baru dalam

¹Politik etis yaitu usaha untuk mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Politik etis tersebut yaitu membangun irigasi di daerah-daerah pertanian/perkebunan, menyelenggarakan emigrasi di daerah yang sudah dirasa padat dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Lihat buku karya Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), p.14

²Politik etis merupakan "hutang kehormatan" yang harus dibayar pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia. Politik etis terdiri atas irigasi, edukasi dan imigrasi. Politik etis ini disampaikan oleh Van Deventer dalam sebuah artikel di majalah *De Gids* tahun 1899.

³Yusuf Perdana, Ronaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2022), p. 15

perjuangan melawan kolonialisme. Melalui bidang pendidikan muncul golongan terpelajar yang mampu menjadi pelopor pergerakan nasional. Kaum terpelajar inilah yang nantinya memimpin pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda.⁴ Pergerakan nasional merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan yakni pada kurun tahun 1908-1945.⁵

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa kemudian membentuk pemerintahan yang berdaulat. Salah satu syarat bagi berdirinya sebuah negara adalah terbentuknya pemerintahan. Syarat lainnya adalah adanya wilayah, penduduk, dan pengakuan dari negara lain. Pembicaraan tentang negara dan sistem pemerintahan telah dilakukan sejak zaman pergerakan nasional. Pada masa itu para tokoh pergerakan dan pemimpin bangsa berupaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dilakukan dengan mendirikan organisasi pergerakan.⁶

Pada awal abad ke-20, muncul organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indische Partij. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo pertama kali dibentuk dengan maksud untuk menghimpun dana beasiswa pendidikan bagi kalangan priyayi Jawa. Mereka menyadari perlunya pendidikan untuk membangun negara yang lebih maju. Melalui pendidikan bangsa Indonesia dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Pendirian organisasi ini dimotori oleh seorang dokter Jawa

⁴ Armelia F, *Bangkitnya Kesadaran Nasional*, (Jawa Tengah: Alprin, 2019), p. 6

⁵ Ahmadin, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2015), p. 1

⁶ Wahjudi, *Kabinet-Kabinet di Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Cempaka Putih, 2019), p. 1

bernama Wahidin Sudirohusodo.⁷ Kelahiran Budi Utomo memberikan inspirasi bagi kalangan intelektual lainnya untuk membentuk organisasi guna mewujudkan cita-citanya.

Pada tahun 1911 lahirlah sebuah partai yang lebih radikal, yaitu *Indische Partij* yang dipimpin oleh Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi politik yang membangun kesadaran bangsa. Partai ini mengikrarkan nasionalisme untuk bangsa Hindia dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Hindia. Karena sifat dan tuntutan yang radikal, pemerintah Hindia Belanda membubarkannya dan mengasingkan pemimpin utamanya ke negeri Belanda.⁸

Kemudian pada tanggal 15 November 1908, didirikanlah organisasi yang bernama *Indische Vereeniging* (Perkumpulan Hindia Belanda). *Indische Vereeniging* pada mulanya bergerak dalam bidang sosial.⁹ Didirikan oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studinya di negeri Belanda. Tujuan dibentuknya *Indische Vereeniging* adalah sebagai tempat berkumpulnya para pelajar yang ada di Belanda untuk mempersatukan pemikiran dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Adapun pendiri *Indische Vereeniging* adalah para pelajar Indonesia yang terdiri dari *Sutan Casayangan, Sosro Kartono, Hussein Djajadiningrat, Noto Soeroto, Notodiningrat, Sumitro Kolopaking, dan dr. Apituley*. Sutan Casayangan

⁷Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), p.1

⁸Effendi Wahyono, "Sumpah Pemuda dan Tumbuhnya Kesadaran Berbangsa" Volume 02, No. 2, Desember 2018, Universitas Terbuka Indonesia, p. 124

⁹Sudiyo dkk, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Kebangkitan Nasional, 1997), p. 24

adalah mahasiswa Sekolah Perguruan Tinggi di Haarlem, Sutan Casayangan juga adalah ketua *Indische Vereeniging*, yang memimpin organisasi ini mulai dari 15 November 1908 sampai tahun 1914.

Secara berurutan nama organisasi *Indische Vereeniging* banyak mengalami perubahan, *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922, hal tersebut dikarenakan para mahasiswa merasa nama tersebut masih mengandung arti penjajahan maka pada tahun 1925 diubah dengan bahasa Nasional dengan nama Perhimpunan Indonesia. Ternyata bukan nama organisasi saja yang diubah tetapi nama majalah Hindia Putera juga diganti menjadi Indonesia Merdeka.¹⁰

Semangat ke-Indonesiaan semakin jelas setelah Iwa Kusuma Sumantri bergabung dan memimpin *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia). Iwa Kusuma Sumantri merupakan tokoh intelektual yang sangat mencurahkan pemikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Iwa Kusuma Sumantri mendalami ilmu hukum di Belanda tepatnya di Universitas Leiden. Sikap pergerakan nasionalnya ditunjukkan dengan bergabung pada sebuah organisasi *Indonesische Vereeniging*.¹¹

Sebagai ketua baru *Indonesische Vereeniging*, pada awal Januari 1923, Iwa Kusuma Sumantri menekankan perjuangan politiknya dalam tiga hal yaitu, *Pertama*, Indonesia harus menentukan nasib sendiri; *Kedua*, untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan

¹⁰Yusinta Tia Rusdiana, dkk, "Peran Organisasi Perhimpunan Indonesia dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan di Belanda", JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP UNJA, p.59

¹¹Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), p. 195

dan kemampuan sendiri; *Ketiga*, Iwa Kusuma Sumantri mengajak seluruh bangsa Indonesia bersatu melawan Belanda. Sebagai ketua, Iwa Kusuma Sumantri menyerukan agar para mahasiswa di Belanda terus mengikuti perkembangan politik di tanah air. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi ketua *Indonesische Vereeniging*, Iwa Kusuma Sumantri menyatakan bahwa masa depan Bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak pada kelembagaan dan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing.¹²

Kegiatan politik *Indonesische Vereeniging* untuk mewujudkan kemerdekaan Bangsa Indonesia semakin jelas dengan mengubah nama *Indonesische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Perubahan nama *Indonesische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) menunjukkan gerakan kebangsaan Indonesia menemukan identitas baru, yaitu identitas Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia pada tahun 1922.

Iwa Kusuma Sumantri merupakan tokoh yang berasal dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Iwa Kusuma Sumantri telah berjuang sejak di negeri Belanda melalui organisasi yang diketuainya pada tahun 1923 yakni *Indonesische Vereeniging*. Orientasi organisasi ini mengarah kepada Indonesia Merdeka dengan prinsip kesatuan Nasional, Solidaritas, Non-koperatif dan Swadaya. Sekembalinya Iwa

¹²J, Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta: Grafiti Press, 1993), p.6-7

Kusuma Sumantri ke tanah air, ia turut serta dalam memerdekakan Indonesia dan aktif dalam berbagai bidang pemerintahan Republik Indonesia.

Pada masa kolonial Belanda Iwa Kusuma Sumantri turut berperan aktif membela kaum buruh perkebunan di Deli dengan mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya dalam surat kabar Matahari Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Iwa Kusuma Sumantri juga ikut bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Iwa Kusuma Sumantri juga yang mengusulkan agar kata Maklumat diganti menjadi Proklamasi.¹³

Setelah Indonesia merdeka banyak sekali yang telah Iwa Kusuma Sumantri lakukan dalam bidang pemerintahan Republik Indonesia. Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam bidang pemerintahan banyak diketahui oleh khalayak umum. Namun dalam penelitian tersebut belum banyak yang membahasnya secara rinci.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1946-1971. Alasan mengapa penulis membahas tokoh Iwa Kusuma Sumantri dalam penelitian ini dikarenakan tokoh Iwa Kusuma Sumantri ini merupakan tokoh nasional Indonesia yang dikenal dengan semangat menentang penjajahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil batas waktu penelitian antara tahun 1946 sampai tahun 1971. Dikarenakan dalam hal ini penulis hendak melanjutkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga

¹³Nina Herlina, "Meneladani kepejuangan Iwa Kusuma Sumantri (1899-1971)," <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>. (diakses pada Kamis, 08 Desember 2022)

penulis memulai penelitian ini dari tahun 1946 sampai tahun 1971. Karena ditahun 1945 Iwa Kusuma Sumantri sudah mulai menjadi Menteri Sosial. Selain itu, setelah Indonesia merdeka, Iwa Kusuma Sumantri juga banyak berkecimpung di dalam dunia pemerintahan Republik Indonesia. Begitu banyak kontribusi yang telah Iwa Kusuma Sumantri berikan bagi bangsa Indonesia sampai dengan akhir hidupnya, sehingga penelitian ini penting dilakukan. Oleh karena itu penulis mengambil skripsi dengan judul Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia tahun 1946-1971.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana riwayat hidup Iwa Kusuma Sumantri?
2. Bagaimana dinamika perjuangan Iwa Kusuma Sumantri pada masa revolusi tahun 1946-1949?
3. Bagaimana kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam pemerintahan republik Indonesia Tahun 1950-1971?

C. Tujuan Masalah

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui riwayat hidup Iwa Kusuma Sumantri.
2. Untuk mengetahui dinamika Iwa Kusuma Sumantri pada masa revolusi tahun 1946-1949.
3. Untuk mengetahui kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam pemerintahan republik Indonesia tahun 1950-1971.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka merupakan elemen kunci dalam setiap disiplin ilmu karena memberikan ringkasan bukti yang ada dan diperlukan untuk menginformasikan proyek akademik, kebijakan, dan praktik baru.¹⁴

Setelah penulis berkunjung sejumlah perpustakaan untuk melakukan tinjauan kepustakaan terhadap beberapa karya tulis baik berupa buku-buku maupun jurnal. Sejauh ini penulis menemukan sejumlah pustaka yang terkait dengan judul yang dibahas, diantaranya:

Dalam karya tulis ilmiah berupa buku karya Iwa Kusuma Sumantri yang berjudul *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah*. Di dalam buku ini menceritakan tentang autobiografi Iwa Kusuma Sumantri semasa hidupnya.

Dalam sebuah karya ilmiah berupa buku karya Mardanas Safwan yang berjudul *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri SH: Hasil Karya dan Pengabdianya*. Dalam buku ini menceritakan masa Iwa Kusuma Sumantri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam sebuah karya ilmiah berupa jurnal karya Nina Herlina yang berjudul *Meneladani Kepejuangan Iwa Kusuma Sumantri (1899-1971)* yang dapat diakses secara online melalui link <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>. Di dalam jurnal ini menceritakan tentang perjuangan Iwa Kusuma Sumantri sebagai tokoh perintis bangsa, aktivitas dalam dunia pergerakan, dibuang dan dipenjara, menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menjadi menteri pertahanan, menjadi rektor pertama Universitas Padjajaran (Unpad) dan sampai

¹⁴Muhammad Syukri Nur & Aep Saepul Uyun, *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar metode penelitian sekunder untuk energi terbarukan*, (Klaten: Lakeisha Anggota IKAPI, 2019), p.50

akhir perjuangannya. Akan tetapi pembahasan tersebut tidak dijelaskan secara detail detail dan rinci.

Dari kedua sumber di atas menjelaskan tentang tokoh Iwa Kusuma Sumantri, namun kedua karya tulis tersebut berbeda, di dalamnya tidak dijelaskan bagaimana kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam pemerintahan republik Indonesia tahun 1946-1971. Kedua karya tulis tersebut lebih memfokuskan pada kontribusi Iwa Kusuma Sumantri sebelum mencapai masa kemerdekaan yakni perjuangan Iwa Kusuma Sumantri dalam memerdekakan Indonesia. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian ini setelah Indonesia merdeka dengan judul Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1946-1971. Adapun batas waktu penelitian ini adalah antara tahun 1946 sampai tahun 1971, yakni sampai akhir perjuangan Iwa Kusuma Sumantri.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi kiprah adalah kegiatan. Sedangkan berkiprah adalah melakukan kegiatan atau berpartisipasi dengan semangat tinggi atau bergerak, berusaha disebuah bidang.¹⁵ Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* kata kiprah diartikan sebagai tindakan, aktifitas, kemampuan kerja, reaksi, cara pandang seseorang terhadap ideology atau institusinya.¹⁶

Kiprah sendiri tidak bisa lepas dari aktivitas. Pengertian aktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keaktifan kegiatan-kegiatan, kesibukan-

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), cet ke-8, p. 17

¹⁶WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), p. 735

kesibukan atau biasa juga berarti kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga. Dari pemaparan tersebut arti kiprah tidak jauh berbeda dengan aktivitas, akan tetapi terdapat perbedaannya. Kiprah adalah melakukan kegiatan dengan semangat tinggi sedangkan aktivitas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu arti kiprah disini didefinisikan dengan bagaimana cara Iwa Kusuma Sumantri dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Sehingga pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pemerintahan berasal dari kata "perintah" setelah ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, dalam hal ini perbedaan antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin, *gubernare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan.¹⁷

Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aktivitas atau kegiatan

¹⁷Andri Haryono, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), p. 1

yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja, dalam hal ini dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.¹⁸

Secara etimologi negara berasal dari bahasa asing "*staat*" (Belanda-Jerman), atau "*state*" (Inggris), dan "*etate*" (Prancis). Kata *staat* dan *state* pun berasal dari bahasa latin, yaitu status atau *statum* yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status itu dalam bahasa latin klasik yaitu sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.¹⁹

Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ negara tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.²⁰

Dilihat dari UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat (1) "Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik", maka Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk kesatuan. Dasar lain yang menegaskan bentuk negara kesatuan

¹⁸Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), p. 46

¹⁹F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), p. 92

²⁰Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000),

adalah dengan masih adanya ciri-ciri negara kesatuan yaitu hanya terdapat satu undang-undang dasar, satu Kepala negara dan satu Dewan Menteri. Selain itu dilihat dari asal dari kekuasaan yang dimiliki daerah bukanlah berasal dari daerah tetapi sebagai penyerahan dari pemerintah pusat, berlainan dengan negara federal kekuasaan berasal dari negara bagian itu sendiri dan pemerintah federal mendapatkan kekuasaan dari pemberian negara bagian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Karena objek yang akan diteliti adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, oleh sebab itu studi penelitian ini untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengevaluasi data-data sebagai upaya memperoleh fakta-fakta sejarah yang *credible* dan kesimpulan yang berkualitas melalui beberapa tahapan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah, diantaranya: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis), historiografi (penulisan).²¹

1. Pemilihan Topik

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul "Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1946-1971". Alasan penulis mengangkat judul ini dikarenakan tokoh Iwa Kusuma Sumantri merupakan tokoh nasional yang dikenal semangat dalam menentang penjajahan. Namun ia juga

²¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), p.69

banyak berkecimpung di dalam pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini penulis membatasi periodenya ditahun 1946 sampai 1971 dikarenakan pada tahun tersebut Iwa Kusuma Sumantri mulai berkiprah dalam pemerintahan Republik Indonesia dengan terjun diberbagai bidang pemerintahan diantaranya menjadi menteri sosial, menteri pertahanan masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, rektor pertama Universitas Padjadjaran, menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), menteri negara diperbantukan presiden dan anggota Dewan pertimbangan agung. Diakhir perjuangannya tahun 1971 Iwa Kusuma Sumantri meninggal dunia dengan meninggalkan karya yang ditulisnya sendiri berupa buku-buku sejarah. Oleh karena hal tersebut penulis membatasi penelitian ini mulai dari tahun 1946 sampai 1971 yakni ketika Iwa Kusuma Sumantri diangkat menjadi menteri pertahanan sampai akhir perjuangan hidupnya agar pembahasannya tidak melebar.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan kajian pustaka karena penulis menggunakan sumber studi pustaka sebagai informasi dari topik yang diteliti dengan alasan akan lebih mudah dalam melakukan penelitian karena tokoh yang diteliti adalah tokoh nasional. Setelah itu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1946-1971. Setelah data-data terkumpul maka penulis semakin tertarik untuk mengambil judul tersebut.

2. Tahapan Heuristik

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengumpulan sumber (heuristik). Tahapan heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan sumber. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu

heuriskein artinya menemukan. Jadi, heuristik dapat diartikan dengan proses mencari sumber dan jejak-jejak peristiwa sejarah.²²

Dalam hal ini sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah hasil tulisan atau catatan yang sezaman atau dekat dengan peristiwa kejadiannya. Dalam hal ini penulis mengambil buku *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah: Otobiografi Prof. MR. R.H. Iwa Kusuma Sumantri* yang merupakan hasil karya tulisan dari Iwa Kusuma Sumantri, buku karya Mardanas Safwan yang berjudul *Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri S.H Hasil Karya dan Pengabdianannya*, buku karya Marwati Djoened Poesponegoro yang berjudul *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang dan Zaman Republik Jilid VI* dan arsip-arsip dalam bentuk foto ketika Iwa Kusuma Sumantri diangkat Menjadi Menteri Pertahanan yang didapat dari koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan Buku *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah* dan arsip Iwa Kusuma Sumantri dalam bentuk foto ketika dilantik menjadi Rektor Universitas Padjadjaran tahun 1957 yang didapat dari koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, untuk dijadikan sumber primer.

Adapun sumber sekunder bersumber dari buku, skripsi, majalah, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian diantaranya Buku karya Mansyur Daman yang berjudul *Mr. Iwa Kusuma Sumantri*, buku karya Asvi Warman yang berjudul *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*, buku karya J, Ingleson yang berjudul *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan dan mencari sumber data baik yang berbentuk dokumen, arsip, catatan, buku sumber, maupun jurnal ilmiah. Tahap

²²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), p. 100

heuristik ini digunakan untuk dapat mengumpulkan semua sumber data sejarah yang berkaitan dengan penelitian, dengan tujuan untuk meyakinkan penelitian yang dilakukan.²³

Dalam tahapan ini, penulis mengadakan studi kepustakaan yaitu: Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten (PUSDA), Perpustakaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan beberapa perpustakaan lainnya. Dan dari kunjungan tersebut penulis mendapatkan sumber-sumber yang terkait dengan topik yang dibahas yaitu Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1946-1971 diantaranya: karya Mansyur Daman, *Mr. Iwa Kusuma Sumantri*, (Jakarta: Museum Perumusan Naskah Proklamasi, 2016), karya Sudiyo, *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), Djohan Makmur dkk, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), karya J, Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, (Jakarta : Grafiti Press, 1993), dan karya Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

3. Tahapan Kritik

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otensitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. Yang

²³Sumargono, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2021), p. 183

dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Jadi tahapan kritik adalah tahap penyelesaian dan pengujian data baik secara eksternal maupun internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk meneliti kredibilitas isi sumber. Di dalam melakukan kritik internal ini penulis menyeleksi mana yang dijadikan sumber primer dan sekunder.²⁴

4. Tahapan Interpretasi

Tahapan Interpretasi atau penafsiran sumber dilakukan setelah diperoleh fakta-fakta sejarah hasil pengujian dan analisis fakta, sehingga didapatkan suatu rangkaian data yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kompleksnya permasalahan dalam penelitian ini, maka interpretasi berdasarkan suatu sumber penulisan lainnya.²⁵

Menurut Kuntowijoyo, interpretasi terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, dari satu data yang didapat, dan terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Sedangkan sintesis berarti menyatukan, dari beberapa data yang diperoleh dan saling berkaitan dan melengkapi, menuntun penulis membuat kesimpulan.²⁶

²⁴Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 35-37

²⁵Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 45

²⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), p.100

5. Historiografi

Tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara untuk merekonstruksi gambaran masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Pada tahap ini diperlukan keahlian khusus untuk merangkai kata-kata dalam menulis sejarah, dari sumber-sumber yang telah penulis peroleh melalui tahap-tahap sebelumnya. Selain itu diperlukan juga keahlian dalam membuat cerita atau peristiwa berdasarkan waktu yang urut atau jelas (kronologi), menggunakan prinsip kausalitas (hubungan sebab-akibat dengan tepat) dan keahlian imajinatif dalam merangkai kalimat menjadi sebuah cerita yang dapat dipahami serta tersampaikan dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Riwayat Hidup Iwa Kusuma Sumantri, meliputi Biografi Iwa Kusuma Sumantri, Riwayat Pendidikan Iwa Kusuma Sumantri dan Karier Organisasi Iwa Kusuma Sumantri.

Bab III Dinamika Perjuangan Iwa Kusuma Masa Revolusi Tahun 1946-1949, yakni Peristiwa 3 Juli 1946

Bab IV Kiprah Iwa Kusuma Sumantri dalam Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1950-1971, meliputi Menteri Pertahanan masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, Rektor Pertama Universitas Padjadjaran Tahun 1958, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Tahun 1961, Menteri Negara diperbantukan Presiden, Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Akhir Perjuangan Iwa Kusuma Sumantri.

Bab V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.